

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan pusat memberikan dana pada setiap pemerintah daerah untuk diolah berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Berdasarkan kebijakan yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia yaitu memberikan kebebasan untuk pemerintahan setiap wilayah agar mengatur dan menjalankan pemerintahan dengan bebas berdasarkan aturan serta hal-hal yang berlaku pada sektor pemerintahan. Sistem akuntansi pada sektor pemerintah menciptakan pemerintahan daerah yang adil dan transparan. Setelah krisis moneter yang muncul di tahun 1997 pemerintahan diwajibkan membuat laporan anggaran sebagai bentuk tanggungan atau tugas, hal tersebut dilandasi karena pemerintah menyadari perlunya diterapkan akuntansi dalam pemerintahan. Berkembangnya akuntansi dalam sektor pemerintahan menjadikan sebuah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Peraturan ini kemudian diperbarui dan dituangkan dalam Peraturan terbaru dari menteri keuangan nomor 217/PMK.05/2015 menyangkut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual untuk Badan Layanan Umum terhitung mulai berlaku 1 Januari 2016.

Pada sektor pemerintahan, pemerintah daerah adalah *agent* yang dimana memiliki suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *principal* atas kinerjanya. Dalam hal ini teori keagenan (*Agency Theory*) yang diciptakan Jansen dan Mecking (1976) ada kaitannya, dimana menjelaskan koneksi kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dimana dalam pekerjaan, agen bertanggungjawab atas kinerjanya pada prinsipal. Pemerintah daerah berperan menjadi agen dimana memiliki kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada prinsipal yaitu kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), kepada struktur pemerintah yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Teori

keagenan dalam sektor pemerintahan adanya hubungan antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent* dimana *principal* memberikan pekerjaan kepada *agent* yang melakukan pekerjaan. Mardiasmo (2002; dalam Fajar, 2017) menjelaskan bahwa *agent* sebagai pemegang amanah dan *principal* harus membuat pertanggungjawaban berupa menyediakan, memberikan laporan, dan menyatakan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi tugas (*principal*) yang mempunyai kuasa untuk memperoleh tanggung jawab tersebut. Mardiasmo (2002; dalam Fajar, 2017) berpendapat mengenai tanggung jawab pada pemerintahan memiliki arti yaitu dalam mengelola pemerintahan daerah yaitu antara masyarakat dan struktur pemerintahan yang lebih tinggi sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen.

Menyusun laporan keuangan yang berkualitas merupakan kewajiban dari pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada prinsipal. Dalam Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah setidaknya harus berisi Laporan realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kebijakan dibuat oleh pemerintah dimasa yang akan datang merupakan manfaat dari laporan keuangan yang berkualitas. Ciri khas dari laporan keuangan adalah ukuran-ukuran pada aturan atau norma yang harus disertakan kedalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi. Menurut PP No. 71 tahun 2010 yang juga menjadi ciri khas laporan keuangan pemerintah adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Penelitian dilakukan Rahmadani (2015) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Pasamaan Barat yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen atau pengukur terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hasil penelitian menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian berikut dilakukan oleh Toban dan Kurniawan (2017) di Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di kabupaten Toraja Utara dimana variabel independennya adalah kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern sebagai pengukur atas kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu variabel independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian lain diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014). Penelitian yang dilakukan memiliki dua variabel independen yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah sedangkan pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian yang berbeda ini juga ditemukan oleh Kulumata, Ilat, dan Warongan (2016) yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil yang berbeda-beda membuat peneliti bermaksud menguji kembali beberapa variabel independen dan dependen dari penelitian terdahulu.

Data yang diunggah Badan Pemeriksa Keuangan Nusa Tenggara Timur pada halaman websitenya (<http://kupang.bpk.go.id/>), menunjukan beberapa tahun terakhir, laporan keuangan Kabupaten Sikka mendapat opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), yang artinya terdapat beberapa pos dan akun dalam laporan keuangan kabupaten sikka belum disajikan secara wajar. Di tahun 2017, Laporan Keuangan Kabupaten Sikka mendapat opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) dengan melihat keselarasan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal.

Laporan keuangan daerah kabupaten sikka belum disajikan dengan wajar dan berkualitas karena ada beberapa pos dan akun yang belum disajikan dengan wajar, hal ini diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat beberapa unsur penyebab terjadinya hal tersebut antara lain yang pertama adalah kompetensi sumber daya manusia. Dalam menghasilkan laporan keuangan

diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu pada suatu organisasi yang bisa melakukan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengerti dan mahir dalam akuntansi pemerintahan, akuntansi keuangan daerah bahkan organisasi pemerintahan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Nasaruddin (2008; dalam Ihsanti, 2014) sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan perusahaan atau kunci dari keberhasilan suatu instansi. Pada kenyataannya kabupaten sikka belum bisa menempatkan pegawai yang bekerja pada bidangnya masing-masing, dan pegawai yang bekerja di bagian keuangan bukan lulusan bidang akuntansi.

Unsur kedua adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian cara mulai dari proses mengumpulkan data, mencatat, mengikhtisarkan, sampai melaporkan keuangan untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bisa dikerjakan baik secara manual atau menggunakan aplikasi adalah pengertian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem Akuntansi Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Berliana (2014). Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian terdahulu oleh Ihsanti (2014) yaitu sistem akuntansi keuangan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Unsur yang ketiga adalah Sistem Pengendalian Internal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sebuah prosedur suatu aktivitas dan dilaksanakan secara berulang kali oleh pimpinannya sehingga tercapainya target organisasi lewat kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Toban dan Kurniawan (2017) yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal serupa juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani yang

menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Yang menjadi kelemahan sistem pengendalian internal adalah lemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, lemahnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, juga lemahnya susunan pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian menurut hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan pada umumnya memiliki pengendalian internal sudah memadai.

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka untuk tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017 memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya penyajian laporan keuangan yang dikarenakan adanya beberapa akun atau pos dalam laporan keuangan belum tersajikan secara wajar. Penyebabnya terdiri dari beberapa faktor diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal yang peneliti jadikan sebagai variabel independen.

Dari beberapa alasan di atas, peneliti merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka. Berdasarkan IHPS 1 Tahun 2017 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan pada website (<http://kupang.bpk.go.id/>), bahwa Kabupaten Sikka mendapat opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) dengan melihat keselarasan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian internal sehingga menjadi alasan dipilihnya pemerintah daerah Kabupaten Sikka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sikka?
- b. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sikka?
- c. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sikka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Sikka.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Sikka.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademik

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian berguna bagi daerah yang menjadi objek penelitian, sehingga kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah, sistem pengendalian internal yang sesuai akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi Kabupaten Sikka.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, identifikasi variable, definisi operasional, pengukuran variable, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik penyampelan, dan analisis data

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang simpulan, keterbatasan dan saran.